

**TESIS**

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL YANG NILAI GUGATAN DIBAWAH  
Rp150.000.000,00 BERDASARKAN  
ASAS KEADILAN**



**Oleh:**

**ADE AHDA NABILA  
2320215320146**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JULI 2025**

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL YANG NILAI GUGATAN DIBAWAH  
Rp150.000.000,00 BERDASARKAN  
ASAS KEADILAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh  
ADE AHDA NABILA  
NIM. 2320215320146**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2025**

Judul Tesis : Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai  
Gugatan Di Bawah Rp150.000.000,00 Berdasarkan Asas Keadilan  
Nama : Ade Ahda Nabila  
NIM : 2320215320146

Disetujui,  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing



**Dr. Sapudin, S.H., LL.M.**  
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M  
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

## **MOTO**

Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya.

**(Baskara Putra – Hindia)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho- Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

### **Bapak dan Ibu terkasih,**

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Herlianus** dan **Ibu Yuli Andriani** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

### **Dosen pembimbing tesis,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Ahda Nabila  
NIM : 2320215320146  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Ade Ahda Nabila

NIM. 2320215320146

**Nabila, Ade Ahda. 2025. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai Gugatan Di Bawah Rp150.000.000,00 Berdasarkan Asas Keadilan.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, 117 halaman.

## **RINGKASAN**

Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 berdasarkan asas keadilan. Ketentuan mengenai perkara dengan nilai gugatan tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan bahwa perkara dengan nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 tidak dikenai biaya perkara, termasuk biaya eksekusi. Secara normatif, ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses keadilan, khususnya bagi pihak pekerja yang pada umumnya berada dalam posisi ekonomi dan struktural yang lemah dalam hubungan kerja.

Namun dalam praktik, ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan baru. Ketiadaan anggaran khusus dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadilan negeri/PHI untuk mengeksekusi perkara dengan nilai kecil menyebabkan banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, hak-hak pekerja yang telah diakui dan diputuskan oleh pengadilan menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif. Putusan tersebut hanya menjadi bentuk formalitas hukum tanpa realisasi konkret terhadap pemenuhan hak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari tidak dilaksanakannya eksekusi atas putusan PHI bernilai di bawah Rp150.000.000,00, serta bagaimana pelaksanaan asas keadilan dapat benar-benar terwujud bagi pihak pekerja yang menjadi korban ketidakpastian pelaksanaan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 58 pada dasarnya mencerminkan semangat keadilan prosedural, tetapi tidak didukung oleh instrumen pelaksanaan yang memadai. Ketidakhadiran negara dalam menjamin pelaksanaan eksekusi menimbulkan kesenjangan antara keadilan formil dengan keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, seperti di Pengadilan Negeri Pontianak dan Medan, permohonan eksekusi yang seharusnya dapat dijalankan justru tertunda atau tidak dilaksanakan sama sekali karena alasan administratif dan ketiadaan biaya operasional. Kondisi ini menyebabkan putusan

pengadilan kehilangan makna dan merugikan pekerja sebagai pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Dalam konteks teori keadilan menurut Aristoteles, keadilan harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Ketika putusan telah menyatakan bahwa hak pekerja harus diberikan, tetapi eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka keadilan substantif gagal dicapai. Pekerja tetap kehilangan hak, meskipun telah mendapatkan pengakuan secara yuridis. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap negara dalam melindungi hak-hak buruh.

Tesis ini memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya: Peninjauan ulang terhadap Pasal 58 UU PHI, baik melalui revisi legislasi maupun interpretasi baru melalui peraturan pelaksana (Perma/Permenkumham), penyediaan anggaran negara secara khusus untuk eksekusi perkara PHI bernilai kecil, guna menjamin pelaksanaan putusan secara konkret, peningkatan peran aktif pengadilan dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi serta pengawasan pelaksanaan putusan. Penguatan koordinasi antar lembaga, khususnya antara pengadilan, Kementerian Keuangan, dan Disnakertrans untuk menjamin bahwa setiap putusan PHI benar-benar dapat dijalankan secara adil dan efektif. Dengan demikian, melalui pembenahan regulasi dan tata kelola pelaksanaan eksekusi, negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, sebagaimana diamanatkan dalam asas negara hukum dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Nabila, Ade Ahda. 2025. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai Gugatan Di Bawah Rp150.000.000,00 Berdasarkan Asas Keadilan.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, 117 halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata kunci:** eksekusi, hubungan industrial, keadilan substantif, biaya perkara.

Penelitian ini berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang Nilai Gugatan di Bawah Rp150.000.000,00 Berdasarkan Asas Keadilan”, yang dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkara hubungan industrial dengan nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 tidak dikenai biaya perkara, termasuk biaya eksekusi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini tidak sepenuhnya terlaksana secara efektif karena tidak didukung dengan alokasi anggaran khusus dari negara untuk membiayai proses eksekusi putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta didukung pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembebasan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi pekerja. Ketiadaan anggaran eksekusi menyebabkan banyak putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi, sehingga hak-hak pekerja tidak dapat direalisasikan secara nyata. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terhadap ketentuan Pasal 58, serta penguatan mekanisme anggaran dan pengawasan pelaksanaan eksekusi agar asas keadilan dapat terwujud.

**Nabila, Ade Ahda. 2025. *Execution of Industrial Relations Court Decisions with Claim Value Below Rp150,000,000.00 Based on the Principle of Justice*. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 117 pages.**

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *execution, industrial relations, substantive justice, court fees.*

*This research is entitled “Execution of Industrial Relations Court Decisions with Claim Value Below Rp150,000,000.00 Based on the Principle of Justice”, which is based on the provision of Article 58 of Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. The article stipulates that cases with claims below Rp150,000,000.00 are exempted from court fees, including execution costs. However, in practice, this provision is not fully implemented effectively due to the lack of specific budget allocation from the state to finance the execution process.*

*This is a normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the exemption of court fees under Article 58 does not necessarily provide substantive justice for workers. The absence of execution funding causes many Industrial Relations Court decisions with permanent legal force to be unenforceable, resulting in the workers’ rights remaining unfulfilled. This creates a gap between procedural justice and substantive justice. Therefore, a review of Article 58 is needed, along with strengthening budgetary mechanisms and oversight to ensure justice is truly realized.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Nilai Gugatan Di Bawah Rp150.000.000,00 Berdasarkan Asas Keadilan” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H.,LL.M**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum pidana;
6. teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
7. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

**ADE AHDA NABILA**  
**NIM. 2320215320146**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	43
G. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II BIAYA EKSEKUSI TERHADAP GUGATAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG NILAI GUGATAN DIBAWAH Rp150.000.000,.....	49
A. Biaya Eksekusi Dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	49
B. Gugatan Dalam Pengadilan Hubungan Industrial .....	72
BAB III AKIBAT HUKUM KETIDAKMAMPUAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALBERDASARKAN ASAS KEADILAN .	88
A. Implikasi Ketidakberdayaan Eksekusi Terhadap Keadilan Substansif Bagi Pekerja.....	88
B. Asas Keadilan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan .....	93
BAB IV PENUTUP .....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	